

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



no.id  Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 02 Pekanbaru



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja Perangkat Daerah tahun sebelum dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja 2026 ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Dra. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	37
2.4. Review Terhadap RKPD	47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	70
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	71
3.3. Program dan Kegiatan	73
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	90
BAB V. PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	10
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024	32
2.3. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)	39
2.4. Populasi Ternak Tahun 2021-2024	40
2.5. Target dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan populasi dan Produksi Tahun 2024	42
2.6. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
2.7. Review terhadap RKPD Tahun 2026 Provinsi Riau	48
2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	65
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	72
3.2. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	76
4.1. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2026	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD	2
2.1. Produksi daging tahun 2021 – 2024	37
2.2. Grafik Produksi Daging Ternak Ruminansia Tahun 2021-2024	38
2.3. Grafik Produksi Daging Ternak Unggas Tahun 2021-2024	38
2.4. Grafik Populasi Ternak Tahun 2021-2024	41

BAB I

PENDAHULUAN

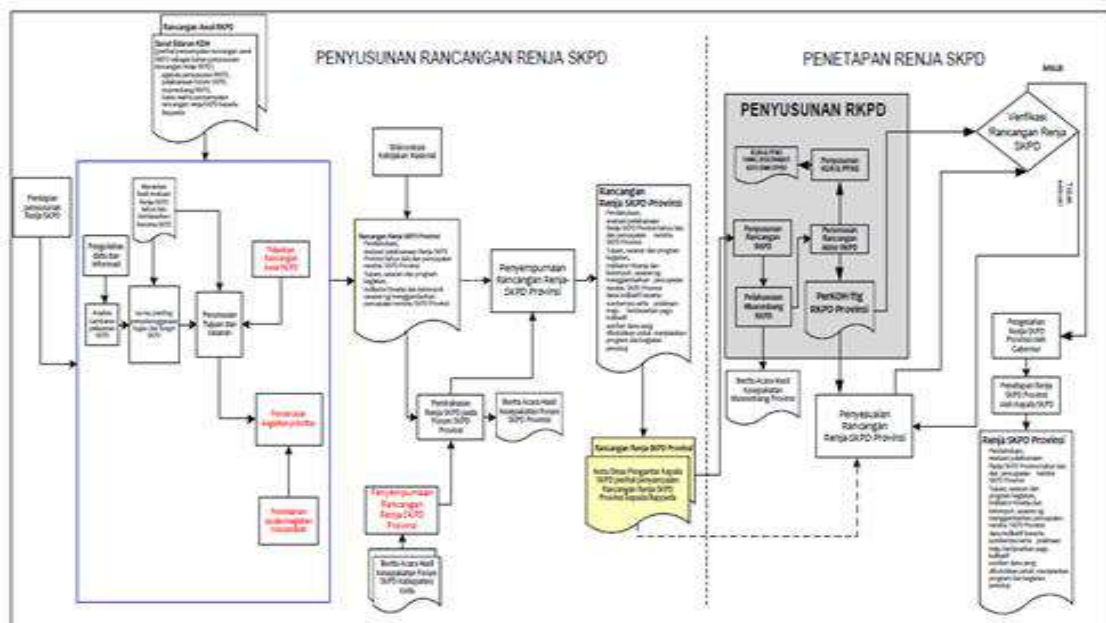
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Disamping itu Renja PD juga bersinergi dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan

penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah

- Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 - 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
 - 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
- 17) Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- 18) Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);
- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
- 21) Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
- 22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran melalui program kegiatan PD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026, serta memuat usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini memuat tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam bab ini juga memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan uraian tentang proses yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan, usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan dan uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta perkiraan capaian Tahun 2025, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada saat penyusunan Renja seharusnya telah disahkan. Evaluasi tersebut dihubungkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sumber evaluasi mengacu pada laporan kinerja tahunan perangkat daerah serta realisasi APBD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi saat ini. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang masih perlu ditangani, sehingga dapat menjadi dasar penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, analisis tersebut digunakan untuk memperkirakan kondisi pembangunan yang akan datang agar perencanaan Tahun 2026 lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan daerah.

Prinsip akuntabilitas menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu melalui pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai dasar penilaian kinerja dan penetapan target Tahun 2026. Rekapitulasi hasil evaluasi Renja dan capaian Renstra hingga Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel.T-C.29)

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100	100	99,12	99,12	100	51,51	51,51
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	-	12	12	100	12	2	16,67
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	-	4	4	100	4	-	-
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	5 Laporan	5	5	5	100	5	-	-
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	2.784 Orang/ Bulan	2.766	1.476	1.476	100	2.784	1.028	36,93
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	6 Jenis Layanan	7	7	7	100	6	-	-
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Paket	1	1	1	100	1	-	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	6 Jenis Layanan	5	5	5	100	6	1	16,67

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	1	1	100	1	1	50
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	2	5	5	100	2	1	50
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	4	1	1	100	1	1	75
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2	1	1	100	1	1	50
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket							
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	4 Jenis	7	4	4	100	4	21	514,46
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	3	1	1	100	1	-	-
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5 Laporan	4	1	1	100	1	1	50

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	6 Jenis	9	3	3	100	4	3	75
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	26	1	1	100	1	-	25
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	22 Unit	104	20	20	100	19	19	100
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	35 Unit	18	18	18	100	18	15	83,33
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	-	-	-	-	2	-	-
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1	-	-
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	206.741 Ekor							
		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	-	3,84	1,85	2,55	137,84	3	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2 Kelompok	4	2	2	100	-	-	-
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	13 Laporan	7	1	1	100	-	-	-
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3.550 Ton	1.834	1.350	1.477	109,41	-	-	-
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	4 Laporan	9	1	1	100	-	-	-
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelahiran (Ekor)	27.352 Ekor	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Angka kelahiran (Persen)	-	10	13,20	9,22	69,85	10	5	49
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	9	1	1	100	-	-	-
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	25 Laporan	25	12	12	100	1	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	3 Dokumen	-	5	5	100	-	-	-
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)/ST	100 ST (Satuan Ternak)	989	535	535	100	-	-	-
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	113 Ekor	10.693	42165	42.165	100	-	-	-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	2,33 Persen							
		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)		30,75	27	37,74	139,78	12	-	-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Prasarana Pertanian	95 Persen	-	-	-	-	-	-	-
		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	-	36	27	36,43	134,93	20	-	-
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	-	22	22	100	-	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	1,2 Persen	7	9	6	66,67	15	-	-
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	15 Kelompok	85	77	24	31	50	166	332

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok)	661 Kelompok	661	661	661	100	661	496	75
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	15 Kelompok	26	60	60	100	60	45	75
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	12	2	2	100	1	-	-
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	89 Persen	-	-	-	-	-	-	-
		1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	-	2,20	2,20	1,00	154,55	2,10	-	-
		2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10 Persen	47,24	10,00	11,76	117,60	10	-	-
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	35000 Ekor	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	-	22,39	10	30,10	301	10	-	-
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	-	12	12	100	12	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	-	36	36	100	36	27	75
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	-	82,25	90	24,85	28	29	-	-
3.27.04.1.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	62	60	60	100	-	-	-
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	-	-	-	-	1	-	-
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	60 Laporan	-	-	-	-	60	45	75
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	24 Wilayah	-	-	-	-	10	-	-
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	55 Laporan	-	-	-	-	35	26	74,29

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Petugas Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Kompeten	55 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV	-	-	29	38,00	131	-	-	-
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pemabwa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH HPM	-	-	56	64	114	-	-	-
3.27.04.1.04.0004	Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	92 Orang	-	30	30	100	-	-	-
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100 Persen	100	100	100	100	100	17,83	17,83
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	1 Jenis Layanan	2	1	1	100,00	1	-	-
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2	1	1	100	1	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1 Jenis	1	1	1	100,00	1	0,25	25

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.108.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	3 Persen	3,84	1,85	2,55	137,84	3	-	-
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)	62000 Dosis	100.099	55.000	65.921	120	62.000	2.929	4,72
3.27.02.104.0002	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	1 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	34 Persen	30,75	27	37,74	139,78	27	-	-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	86 Persen	74	74	64	86,53	64	-	-
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	8	1	1	100	-	-	#DIV/0!
UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100 Persen	100	100	95,13	95,13	100	13,14	13,14

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	5 Jenis Layanan	4	3	3	100	-	-	-
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	3 Jenis	4	3	3	100	2	-	-
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	17	17	100	5	-	-
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	7	3	3	100	-	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3 Jenis	4	2	2	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1	1	1	50	-	-	-
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24	12	12	100	12	9	75
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	5 Jenis	23	3	3	100	1	-	-
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	-	34	17	17	100	-	-	-
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	34	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	34	21	21	100	1	-	-
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100 Persen	-	-	-	-	100	-	-
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Kerja yang Difasilitasi	1 Unit Kerja	-	-	-	-	1	-	-
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	89 Persen	-	-	-	-	-	-	-
		1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	2 Persen	2,20	2,20	1	154,55	2,15	0,11	5,09

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10 Persen					10		-
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10 Persen	22,39	10	30,10	301	10	-	-
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	-	12	12	100	12	-	-
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	24 Wilayah	62	25	32	128	30	-	-
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	300 Dokumen	622	270	398	147	300	127	42,33
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100 Persen	100	100,00	98,67	98,67	100	17,14	17,14
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	3 Jenis Layanan	5	3	3	100	2	1	50,00

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	2	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	3	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2 Paket	2	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	1 Jenis Barang	1	1	1	100	-	-	-
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	25	5	5	100	-	-	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3 Jenis	4	3	3	100	3	-	-
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12	12	12	100	12	9	75
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	24	12	12	100	12	9	75

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	1 Jenis	5	1	1	100	1	-	-
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	2	12	12	100	5	3	60
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,69 Persen	3,84	1,85	2,55	137,84	3	-	-
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Produksi HPT	810 Ton	-	20	-	-	3	-	-
3.27.02.1.05.0001	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	-	48	12	12	100	12	6	50
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	34 Persen	30,75	27,00	37,74	139,78	-	-	-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	65 Persen	60	63	63	99	-	-	-
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	6	4	4	100	-	-	-

Pada tabel 2.1. yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 berdasarkan Renstra 2019-2024 memiliki memiliki 5 (lima) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan dengan 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, kemudian 4 (empat) Program Urusan Pilihan Pertanian dengan 10 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan Program yang terdiri dari Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Program Non Urusan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan hasil seluruh kegiatan pada program tersebut telah mencapai target. Sedangkan pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yakni tidak terealisasinya Pengadaan Sapi Bull (0%).
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian yakni tidak terealisasinya pembangunan Laboratorium (0%).

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dari 41 Sub Kegiatan sebagian besar realisasi kinerjanya telah mencapai target. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

- Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
- d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
- Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
- Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**
- Sub Kegiatan Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- e. Program Penyuluhan Pertanian**
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

2.1.3. Realisasi Program /Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Terdapat dua sub kegiatan yang menunjukkan capaian melebihi target kinerja yang telah direncanakan, yaitu pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kedua sub-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, serta SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya. Pada sub kegiatan ini ditargetkan penerbitan sebanyak 56 dokumen, namun realisasi yang dicapai mencapai 64 dokumen, atau setara dengan tingkat realisasi 114,29%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan sertifikasi veteriner, sekaligus menunjukkan kesiapan perangkat daerah dalam memberikan layanan secara optimal.
2. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPT LVKH). Target yang direncanakan adalah pengujian sebanyak 270 dokumen, namun realisasi yang dicapai mencapai 398 dokumen, dengan tingkat realisasi 147,41%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan layanan laboratorium serta kemampuan UPT LVKH dalam memperluas cakupan pengujian kesehatan hewan dan produk hewan secara profesional dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kedua sub kegiatan tersebut tidak hanya menggambarkan kinerja yang melampaui target, tetapi juga memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi standar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Hal ini menjadi modal penting bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk terus memperkuat layanan veteriner yang berkualitas, mendukung ketertelusuran produk hewan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.

2.1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Program/Kegiatan

Pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target yakni Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yakni tidak terealisasinya Pengadaan Sapi Bull (0%) dan Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian yakni tidak terealisasinya pembangunan Laboratorium (0%) yang disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran.

Sub Kegiatan yang melebihi target ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari target 56 Dokumen terealisasi sebanyak 64 Dokumen dan Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPT LVKH) dengan target 270 Dokumen terealisasi sebanyak 398 Dokumen.

Capaian Kinerja yang melebihi target sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Faktor yang menyebabkan

capaian kinerja yang melebihi target adalah karena kegiatannya lebih dominan berupa pelayanan yang kinerjanya dipengaruhi juga dengan permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan bagi ternak ataupun hewan kesayangan dan permintaan uji lab baik dari perorangan maupun perusahaan yang bergerak dibidang peternakan.

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, terdapat dua sub kegiatan teknis yang menjadi bagian pada Program Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang kinerjanya tidak mencapai target yakni Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Sub kegiatan ini tidak berpengaruh langsung dengan capaian Renstra dimana indikator pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain adalah jumlah populasi. Jumlah populasi lebih dipengaruhi oleh angka kelahiran sebagai hasil dari kegiatan Inseminasi Buatan dan Penyediaan sarana prasarana yang berkaitan dengan Inseminasi Buatan. Sedangkan Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian juga tidak berpengaruh langsung dengan capaian Renstra dimana indikator Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian adalah sentra komoditas peternakan.

Sedangkan pada program/kegiatan yang capaiannya melebihi target yang sebagian besar terdapat pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner tentunya berimplikasi pada capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan

Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Renstra Tahun 2019-2024. Tentunya hal ini merupakan suatu keberhasilan yang perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat analisis risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan, agar hambatan bisa diantisipasi sejak awal. Sementara itu, untuk kegiatan yang sudah melampaui target, maka target kinerja ke depan perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penambahan target ini tentu harus didukung dengan tambahan anggaran, terutama untuk pengadaan obat-obatan, vaksin, biaya operasional pelayanan, serta dukungan sarana prasarana. Dengan begitu, pelayanan kesehatan hewan, pengobatan, dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih baik, lancar, dan memberi manfaat nyata bagi peternak.

Selain itu, perencanaan anggaran juga harus lebih efisien dan tepat sasaran, serta dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi agar hasil kegiatan bisa terus diperbaiki di tahun berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan di dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026*	Tahun 2027*	
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan			104,2	-	-	-	94,94 (91,11%)	-	-	-	IKU Renstra 2019-2024
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)				98	100	101		98	100	101	IKU Renstra 2025-2029
3	Produksi Daging (Ton)			80.632				84.615 (104,94%)	3,5	3,5	3,5	IKU Renstra 2019-2024
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging			-	66	68	70	-	66	68	70	IKU Renstra 2025-2029
5	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal			-	3,5	3,5	3,5	-	3,5	3,5	3,5	IKU Renstra 2025-2029
6	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)			98	-	-	-	98,7 (100,71%)	-	-	-	IKU Renstra 2019-2024
7	Persentase penurunan kasus penyakit hewan			-	10	10	10	-	10	10	10	IKU Renstra 2025-2029
8	Persentase Peningkatan produk hewan yang ASUH (%)			5	5	5	5	5,71 (114,20%)	5	5	5	IKU Renstra 2019-2024 dan IKU Renstra 2025-2029
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			75,25	75,85	76,5	77	75,2 (100%)	75,85	76,5	77	IKU Renstra 2025-2029

Ket : * Angka Sementara

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat adanya perbedaan fokus kinerja antara Renstra 2019-2024 dan Renstra 2025-2029. Pada Renstra 2019-2024, indikator lebih diarahkan pada peningkatan kinerja usaha dan produksi subsektor peternakan, seperti *NTUP Peternakan*, *Produksi Daging*, *Status Kesehatan Hewan*, dan *Peningkatan Produk Hewan yang ASUH*. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian indikator sudah tercapai bahkan melampaui target, namun NTUP Peternakan masih belum memenuhi target.

Mulai periode Renstra 2025-2029, indikator kinerja mengalami penyesuaian untuk lebih mendukung kebutuhan pembangunan ke depan. Indikator yang digunakan mencerminkan fokus pada kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan pengendalian penyakit, antara lain *NTPT*, *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging*, *Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal*, dan *Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan*. Beberapa indikator seperti *Peningkatan Produk Hewan ASUH* dan *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* tetap dipertahankan untuk menjaga kesinambungan penilaian kinerja.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa indikator Produksi Daging telah mencapai target bahkan melebihi target dan tiga indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (%).

Tercapainya target produksi daging dengan persentase realisasi sebesar 104,94% menunjukkan bahwa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap peningkatan produksi daging. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging

selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Indikator persentase status kesehatan hewan tahun 2024 adalah sebesar 98,7% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,71%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Influenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi. Tahun 2024, walaupun penyakit LSD dan PMK tidak menjadi wabah lagi, namun upaya pengendaliannya tetap dilakukan dengan melaksanakan vaksinasi LSD dan PMK. Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Indikator persentase produk hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 2.2, diketahui bahwa persentase produk hewan yang ASUH pada tahun 2024 adalah sebesar 5,71% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114,20% dari yang ditargetkan.

Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting, karena unit usaha merupakan titik awal penentuan kualitas produk hewan, maka penerapan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk harus dijalankan secara konsisten menurut aturan/standar operasional yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi

Nomor Kontrol Veteriner. NKV sebagai border utama pengawasan praktik hygiene sanitasi dan keamanan produk hewan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik nyata dilapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar higiene sanitasi dan penjaminan keamanan pangan yang benar, maka akan menimbulkan dampak atau resiko buruk bagi mutu dan keamanan produk serta kesehatan manusia dan lingkungan. Selain permasalahan penerapan teknis produksi, faktor biaya produksi serta nilai jual produk akan memicu praktik penyimpangan prinsip-prinsip kesmavet.

Bentuk penyimpangan kesmavet dalam hal penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan yang masih sering ditemukan yaitu proses penanganan karkas di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dilakukan di lantai atau melakukan pemotongan hewan tempat pemotongan hewan yang tidak resmi, penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging beku di pasar tradisional dengan tidak menggunakan sistem penyimpanan dingin, pengawasan terhadap produk olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal dll), ketidak patuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis unit usaha dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan dan kasus penyimpangan kesmavet lainnya.

Upaya pemerintah provinsi dalam penjaminan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha adalah melalui sertifikasi kontrol veteriner/NKV, namun belum banyak unit usaha yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan NKV. Pemenuhan kebutuhan produk hewan sebagian besar dipenuhi dari luar Provinsi Riau, sehingga usaha distributor produk hewan dan usaha ritel produk hewan semakin berkembang, sedangkan unit usaha di dalam daerah yang memproduksi produk hewan masih terbatas, terutama unit usaha Rumah Potong Hewan. Hingga saat ini

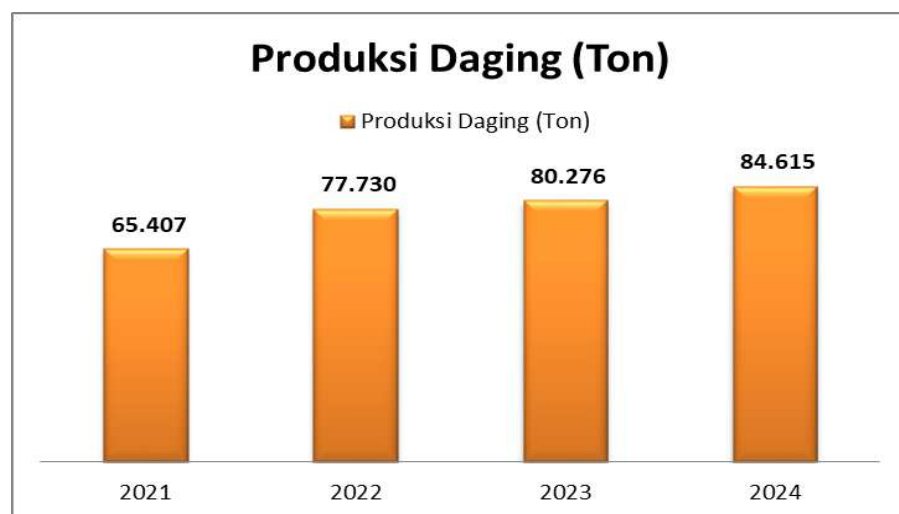
seluruh RPH-R/RPH-U/RPH-B di Provinsi Riau belum bersertifikasi NKV. Hal ini yang menyebabkan masih rendahnya persentase Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH di Provinsi Riau.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat.

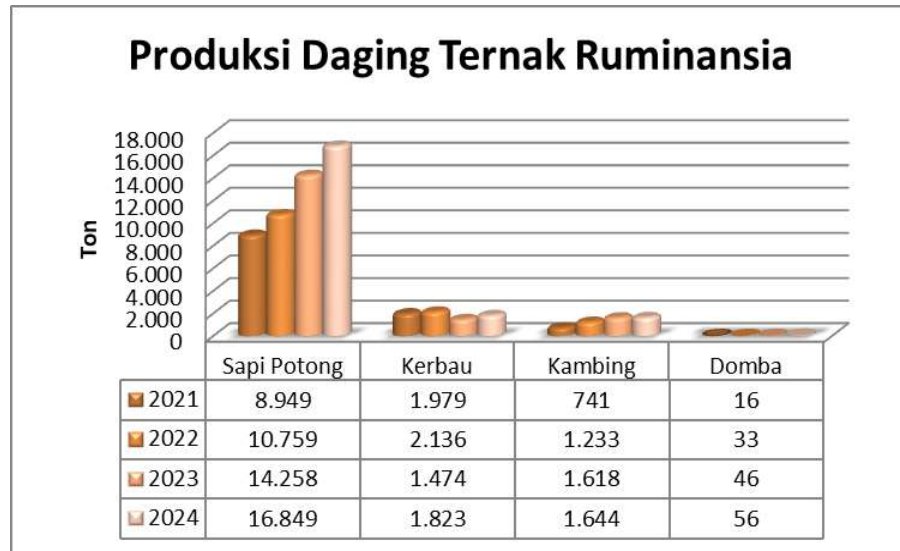
Capaian target produksi daging pada tahun 2024 sebesar 84.615 ton (104,94%). Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra.



Gambar 2.1. Produksi daging tahun 2021 - 2024

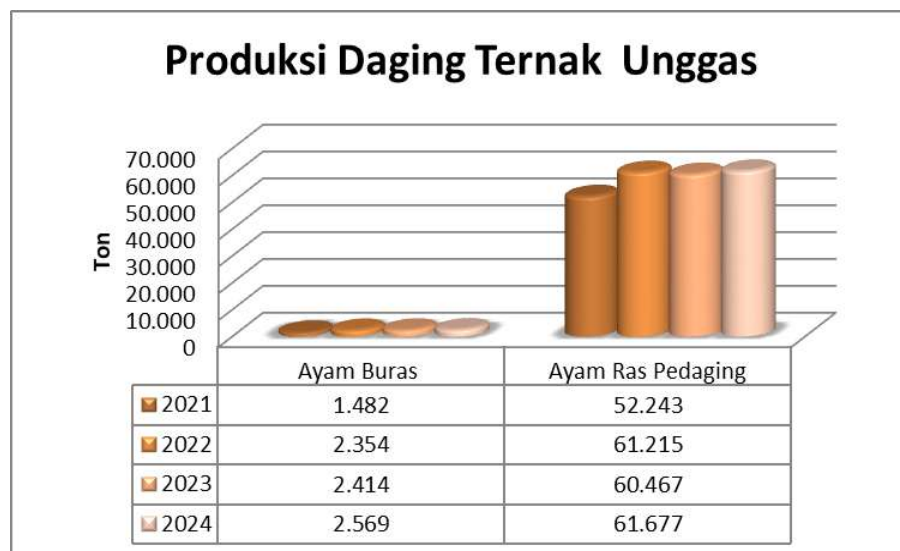
Pada gambar 2.1 terlihat adanya peningkatan produksi daging dari tahun 2021 hingga 2024. Produksi daging sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi atau permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging meningkat setiap tahunnya sebagai akibat

dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi. Produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dan domba dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Grafik Produksi Daging Ruminansia Tahun 2021-2024

Adapun produksi daging unggas untuk ternak ayam buras dan ayam ras pedaging dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3. Grafik Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2024

Tabel.2.3. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak (Kg)

Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging (Kg)			
	2021	2022	2023	2024*
Sapi Potong	8.948.696	10.759.381	14.256.466	16.848.975
Kerbau	1.978.715	2.135.773	1.473.635	1.822.273
Kambing	741.404	1.232.929	1.617.149	1.643.137
Domba	15.583	33.332	46.130	55.489
Ayam Buras	1.481.144	2.353.334	2.414.564	2.569.087
Ayam Ras Pedaging	52.242.136	61.214.925	60.466.990	61.676.330
Jumlah	65.407.678	77.729.674	80.274.934	84.615.291

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa produksi daging Tahun 2024 di Riau sebanyak 84.615.291 Kg atau 84.615 Ton. Produksi daging tersebut berasal dari ternak ruminansia dan unggas baik ternak lokal maupun produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada tabel berikut:

Tabel.2.4. Populasi Ternak Tahun 2021-2024

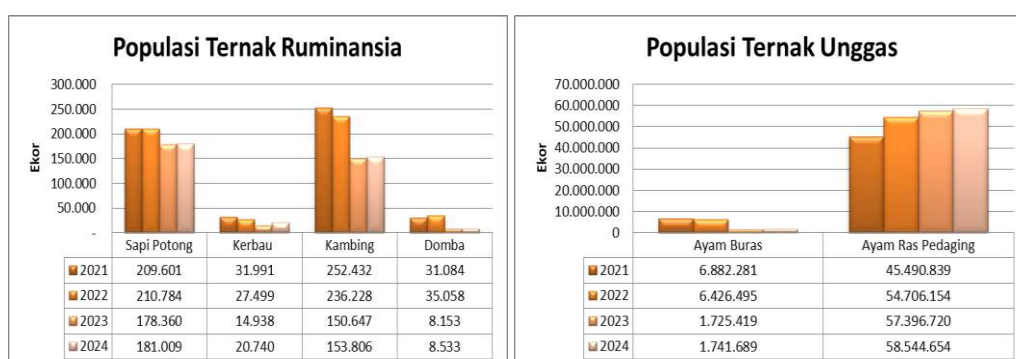
Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	209.601	210.784	178.360	181.009
Kerbau	31.991	27.499	14.938	20.740
Kambing	252.432	236.228	150.647	153.806
Domba	31.084	35.058	8.153	8.533
Ayam Buras	6.882.281	6.426.495	1.725.419	1.741.689
Ayam Ras Pedaging	45.490.839	54.706.154	57.396.720	58.544.654

*Angka Sementara

Dari tabel tersebut dapat dilihat populasi ternak mengalami fluktuasi. Ternak ruminasia sapi, kambing dan domba tahun 2022 dan 2024 mengalami peningkatan, namun tahun 2023 populasi ternak ruminansia mengalami penurunan. Populasi ternak tahun 2023 berdasarkan data hasil Sensus Pertanian 2023 yang menghitung pada posisi 1 Mei 2023. Penurunan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terjadi karena pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan dan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Riau yang membatasi hewan dan produk hewan keluar/masuk dari provinsi lain. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Riau lebih banyak mendatangkan ternak untuk dipotong dari provinsi lain. Ternak yang ada di Riau hanya sebagian kecil yang dipotong sekitar 20% dari pemenuhan butuhan daging, selebihnya pemenuhan daging berasal dari ternak yang didatangkan dari provinsi lain. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, ternak dari luar provinsi sangat susah masuk

sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, ternak milik Masyarakat di Riau yang banyak dijual dan dipotong sehingga populasi ternak tahun 2023 di Riau menjadi jauh berkurang.

Upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka).



Gambar 2.4. Grafik Populasi Ternak Tahun 2021-2024

Dari gambar 2.4 dapat dilihat grafik jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Namun pada tahun 2022 populasi ternak mengalami sedikit penurunan terutama pada ternak kerbau dan kambing. Populasi Sapi tahun 2021 dari 209.601 ekor meningkat menjadi 210.784 ekor pada tahun 2022. Populasi kerbau tahun 2021 sebanyak 31.991 ekor turun menjadi 27.449 ekor pada tahun 2022. Populasi kambing tahun 2021 sebanyak 252.432 ekor menurun menjadi 236.228 ekor pada tahun 2022 dan populasi domba meningkat pada tahun 2022 menjadi 35.058 ekor dari sebelumnya 31.084 ekor. Pada ternak unggas, populasi ayam buras mengalami penurunan populasi dari 6.882.281 ekor pada tahun 2021 menjadi 6.426.495 ekor pada tahun 2022, sedangkan populasi ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 45.490.839 ekor pada tahun 2021 menjadi 54.706.154 ekor pada tahun 2022. Tahun 2023 seluruh populasi mengalami

penurunan berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 yang dilakukan oleh BPS. BPS melakukan pendataan ternak secara serentak seluruh Indonesia per tanggal 1 Mei 2023, sementara mobilitas ternak sangat tinggi.

Pada tahun 2024 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 23.569 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2024 telah lahir sebanyak 11.625 ekor dengan tingkat capaian sebesar 49 persen. Salah satu penyebab capaian sangat rendah karena pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2025.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi dan Produksi tahun 2024

No	Kabupaten	Target Akseptor IB (Ekor)	Realisasi Akseptor IB (Ekor)	Capaian (%)	Target Lahir IB dan KA (Ekor)	Realisasi Kelahiran (Ekor)			Capaian (%)
						Inseminasi Buatan (IB)	Kawin Alam (KA)	Total Kelahiran (Ekor)	
1	Kuantan Singingi	6.400	2.463	38	5.238	1.578	335	1.913	37
2	Indragiri Hulu	6.800	2.105	31	6.042	1.498	469	1.967	33
3	Indragiri Hilir	1100	124	11	820	51	125	176	21
4	Pelalawan	1.600	124	8	1.386	78	56	134	10
5	Siak	3.100	1.472	47	3.019	989	268	1.257	42
6	Kampar	7.200	3.513	49	5.614	2.721	458	3.179	57
7	Rokan Hulu	6.600	2.411	37	5.018	1.400	573	1.973	39
8	Rokan Hilir	1.600	347	22	1563	206	71	277	18
9	Bengkalis	2.400	701	29	2.154	253	193	446	21
10	Kep Meranti	250	36	14	311	25	16	41	13
11	Pekanbaru	150	3	2	239	0	5	5	2
12	Kota Dumai	1.600	252	16	1128	88	169	257	23
Jumlah		38.800	13.551	35	32.532	8.887	2.738	11.625	36

Sumber Data : ISIKHNAS 2024, data diolah

Dari tabel 2.5. dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 38.800 ekor. Dari target 38.800 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 13.551 ekor sapi dan ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Selama tahun 2024 ditargetkan akan lahir 32.532 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan terget dari sebagian hasil IB tahun 2023 dan sebagian hasil IB tahun 2024. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2024 merupakan hasil IB tahun 2024 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2023. Dari 32.532 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi sebanyak 11.625 ekor (79%) yang berasal dari hasil Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 8.887 ekor dan hasil Kawin Alam (KA) sebanyak 2.738 ekor, selebihnya ternak yang saat tahun 2024 bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2025.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan maka permasalahan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance/ Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- Belum lengkapnya sarana prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- Produksi daging yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- Para investor yang belum begitu berminat dalam berinvestasi pada sub sektor peternakan, mengingat jenis peternakan mengandung resiko tinggi (*high risk*) terutama kualitas hasil produksi yang masih rendah.

Peluang :

- Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis peternakan;
- Peluang pasar ternak dan produk peternakan khususnya pasar antara pulau sangat terbuka.

- c. Tingkat konsumsi produk ternak terutama daging dan telur cukup tinggi dan cenderung sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan penduduk;
- d. Kebijakan swasembada daging baik tingkat provinsi maupun nasional;
- e. Melemahnya potensi pasokan dari beberapa wilayah sentra produksi ternak nasional sementara konsumsi pada tingkat nasional terus mengalami peningkatan.

Program pembangunan peternakan dirancang untuk menjawab tantangan strategis dalam penyediaan pangan asal hewan, peningkatan kesejahteraan peternak, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Setiap program diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur, sehingga pencapaian target dapat dipantau secara sistematis dan dikaitkan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Melalui perumusan isu-isu penting, diharapkan program dan kegiatan yang disusun ke depan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Riau, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Formulasi isu-isu penting tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program. Rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain:

1. Meningkatkan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik, penyediaan bibit unggul, dan optimalisasi reproduksi.
2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan kapasitas Puskesmas, cakupan vaksinasi, dan pengendalian penyakit menular strategis.
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan penerapan teknologi budidaya, efisiensi pakan, dan pengembangan usaha berbasis agribisnis.

4. Membangun kemitraan antar-stakeholder untuk mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan mendorong sinergi lintas sektor.
5. Meningkatkan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) guna menjamin terpenuhinya kebutuhan protein hewani bagi masyarakat.

Bidang peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara dokumen RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan di sektor peternakan. Analisis kebutuhan ini berasal dari usulan yang disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis antara Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota. Usulan tersebut terutama menyangkut program dan kegiatan fisik yang menjadi prioritas pembangunan peternakan (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Review terhadap RKPD Tahun 2026 Provinsi Riau (Tabel T.C. 31)

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				41.439.844.951	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				41.439.844.951
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				41.439.844.951	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				41.439.844.951
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				41.439.844.951	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				41.439.844.951
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	32.665.815.069	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	32.665.815.069
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	5 Laporan	27.952.743.474	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	5 Laporan	27.952.743.474
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2784 Orang/Bulan	27.952.743.474	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2784 Orang/Bulan	27.952.743.474
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	7 Laporan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</i>	7 Laporan	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 Jenis Layanan	805.941.814	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 Jenis Layanan	805.941.814
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	29.999.222	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	29.999.222
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	288.596.341	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	288.596.341
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	60.982.020	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	60.982.020
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	47.306.231	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	47.306.231
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	379.058.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	379.058.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis	3.250.984.781	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	4 Jenis	3.250.984.781
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	748.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	748.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.099.999.048	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.099.999.048

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	67.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	67.100.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.083.137.733	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.083.137.733
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	6 Jenis	656.145.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	6 Jenis	656.145.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	44.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	44.030.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	582.115.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14 Unit	582.115.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	18 Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	18 Unit	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	1 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	6.823.856.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	6.823.856.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)</i>	4 Kelompok	-	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)</i>	4 Kelompok	-
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi	<i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan</i>	1 Laporan	-	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi	<i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan</i>	1 Laporan	-
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah produksi pakan unggul (Ton)</i>	3150 Ton	-	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah produksi pakan unggul (Ton)</i>	3150 Ton	-
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	1 laporan	-	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	1 laporan	-
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Persentase Angka kelahiran (Persen)</i>	13.40 Persen	1.325.176.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Persentase Angka kelahiran (Persen)</i>	13.40 Persen	1.325.176.000
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>	3 Laporan	-	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>	3 Laporan	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	1 laporan	1.325.176.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	1 laporan	1.325.176.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>	311 ST	5.498.680.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>	311 ST	5.498.680.000
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	25160 Ekor	5.498.680.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	25160 Ekor	5.498.680.000
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi</i>	0,78 Persen	160.852.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi</i>	0,78 Persen	160.852.000
	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)</i>	22 Persen	160.852.000	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)</i>	22 Persen	160.852.000
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar	<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>	300 Ha	-	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar	<i>Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan</i>	300 Ha	-
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Kepulauan Meranti,	<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	3 Unit	160.852.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Kepulauan Meranti,	<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	3 Unit	160.852.000

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	-	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	-
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10 Persen	1.750.271.882	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10 Persen	1.750.271.882
			Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85 Persen				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85 Persen	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	875.456.250	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	875.456.250
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Semua Kota/Kab	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	113.475.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Semua Kota/Kab	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	113.475.000
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	761.981.250	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	761.981.250
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	776.655.632	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	776.655.632

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>	1 Laporan	101.655.632	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>	1 Laporan	101.655.632
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu,	<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>	60 Laporan	675.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu,	<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>	60 Laporan	675.000.000
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		<i>Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar</i>	15 Wilayah	98.160.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		<i>Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar</i>	15 Wilayah	98.160.000
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</i>	39 Laporan	95.910.000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</i>	39 Laporan	95.910.000
	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</i>	24 Orang	2.250.000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</i>	24 Orang	2.250.000
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi</i>	0,94 Persen	39.050.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		<i>Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi</i>	0,94 Persen	39.050.000
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		<i>Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya</i>	60 Kelompok	39.050.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		<i>Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya</i>	60 Kelompok	39.050.000
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	661 Kelompok	-	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>	661 Kelompok	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi	<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	2 Unit	39.050.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi	<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	2 Unit	39.050.000
	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK				1.745.811.400	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK				1.745.811.400
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.745.811.400	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.745.811.400
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.745.811.400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.745.811.400
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	895.811.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	895.811.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 Jenis Layanan	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	6 Jenis Layanan	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	1 Jenis Barang	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	1 Jenis Barang	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	1 Jenis	895.811.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	1 Jenis	895.811.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	895.811.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	895.811.400

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	850.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	850.000.000
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)</i>	62.000 Dosis	850.000.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)</i>	62.000 Dosis	850.000.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	12 laporan	850.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	12 laporan	850.000.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)</i>	6 Ekor	-	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)</i>	6 Ekor	-
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	6 Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	6 Ekor	-
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-
	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT</i>	78 Persen	-	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT</i>	78 Persen	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kota/Kab	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kota/Kab	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	-
	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN				1.882.591.600	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN				1.882.591.600
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.882.591.600	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.882.591.600
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.882.591.600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.882.591.600
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	1.482.592.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	1.482.592.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 Jenis Layanan	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	1 Jenis	482.592.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	1 Jenis	482.592.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	482.592.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	482.592.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	3 Jenis	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	3 Jenis	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	30 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	30 Unit	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Pelayanan BLUD		<i>Persentase Layanan BLUD sesuai Standar</i>	100 Persen	1.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		<i>Persentase Layanan BLUD sesuai Standar</i>	100 Persen	1.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Pekanbaru	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Pekanbaru	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1.000.000.000
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-
	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT</i>	80 Persen	-	Penataan Prasarana Pertanian		<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT</i>	80 Persen	-
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>	2 Unit	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>	2 Unit	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	2 Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	2 Unit	-
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		<i>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</i>	10 Persen	399.999.600	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		<i>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</i>	10 Persen	399.999.600
			<i>Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</i>	85 Persen				<i>Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</i>	85 Persen	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)</i>	10 Persen	200.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)</i>	10 Persen	200.000.000

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan</i>	12 Laporan	200.000.000	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan</i>	12 Laporan	200.000.000
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		<i>Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet</i>	30 Unit	199.999.600	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		<i>Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet</i>	30 Unit	199.999.600
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	300 Dokumen	199.999.600	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Semua Kota/Kab	<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	300 Dokumen	199.999.600
	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				1.752.176.000	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				1.752.176.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.752.176.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.752.176.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.752.176.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.752.176.000
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	1.390.877.320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	100 Persen	1.390.877.320
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	1 Jenis Layanan	96.980.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>	1 Jenis Layanan	96.980.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	-

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket	96.980.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket	96.980.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</i>	1 Jenis	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</i>	1 Jenis	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	20.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis	1.264.897.320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	3 Jenis	1.264.897.320
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	48.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	14.640.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	14.640.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.202.257.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.202.257.320
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	1 Jenis	9.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	1 Jenis	9.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	3 Unit	9.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	3 Unit	9.000.000
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	361.298.680	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>	3 Persen	361.298.680

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINEREJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT</i>	3 Ekor	361.298.680	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		<i>Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT</i>	3 Ekor	361.298.680
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	12 laporan	361.298.680	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	12 laporan	361.298.680
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>	50 ST	-	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>	50 ST	-
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	50 Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	50 Ekor	-
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>	16 Persen	-
	Penataan Prasarana		<i>Persentase pemenuhan</i>	65 Persen	-	Penataan Prasarana		<i>Persentase pemenuhan</i>	65 Persen	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	2 Unit	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	2 Unit	-
					46.820.423.951					46.820.423.951

Secara umum, kesesuaian antara RKPD dengan kebutuhan pembangunan sektor peternakan sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah, baik berupa kegiatan rutin sesuai tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun usulan dari kabupaten/kota.

Dari hasil review, juga tidak ditemukan perbedaan pada pagu indikatif antara rancangan akhir RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Total pagu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rancangan akhir dan hasil analisis kebutuhan disesuaikan menjadi Rp46.820.423.951. total pagu ini merupakan hasil penyesuaian terhadap kegiatan yang dihapus atau berubah sesuai regulasi baru.

Secara garis besar, hasil review RKPD menunjukkan bahwa sebagian besar program masih konsisten dengan kebutuhan pembangunan peternakan, terutama pada aspek penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian kesehatan hewan, serta kegiatan penyuluhan. Meski demikian, terdapat beberapa kegiatan yang harus disesuaikan nomenklturnya agar sesuai dengan regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, target capaian dan indikator kinerja sebagian besar masih tetap sama, meskipun ada yang hilang atau mengalami perubahan sesuai kebutuhan teknis. Dari sisi pendanaan, pagu indikatif juga mengalami sedikit penyesuaian, namun perubahannya tidak terlalu signifikan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dilaksanakan secara partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dihimpun melalui berbagai mekanisme resmi perencanaan, antara lain Musrenbang berjenjang (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota), Forum Konsultasi Publik RKPD, Forum Perangkat Daerah, serta masukan langsung dari kelompok peternak, asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga terkait. Seluruh usulan direkap melalui aplikasi

perencanaan daerah untuk memastikan transparansi, keterlacakan, dan validasi dokumen.

Setiap usulan selanjutnya diverifikasi dan ditelaah oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025–2029, arahan pembangunan nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator pembangunan subsektor peternakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penelaahan ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat selaras dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta prioritas pembangunan daerah.

Secara substansi, usulan yang masuk sejalan dengan isu-isu strategis subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui penyediaan bibit unggul dan pakan berkualitas, pengendalian penyakit hewan dan zoonosis, termasuk rabies, jembrana, dan penyakit menular strategis lainnya, pengembangan sarana dan prasarana peternakan seperti Poskeswan, sentra produksi, serta pengelolaan limbah dan penyuluhan, penguatan kelembagaan peternak, dan peningkatan kemampuan SDM menuju korporasi peternakan.

Usulan yang paling relevan, mendesak, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat diprioritaskan untuk diakomodasi, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran, urgensi kebutuhan, pemerataan wilayah, serta kesiapan pelaksanaan teknis. Dengan demikian, penelaahan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak hanya mencerminkan aspirasi pemangku kepentingan, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas serta pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Daftar lengkap program dan kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dituangkan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (**Tabel T-C.32**)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	3 Persen	
2	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3.150 Ton	
	a Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kuansing, Inhu, Siak, Kampar, Rohul	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	<i>Pengadaan HPT & Legum (Rumput Pakcong & Indigofera) : 50.000 Stek Chopper : 2 Unit</i>
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.40 Persen	
	a Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	12 Laporan	APBD <i>Akseptor : 38.800 Ekor N2 Cair : 41.000 Liter Semen Beku Non Bali : 30.000 Dosis Pelayanan Kelahiran : 25.000 Ekor</i>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	58 ST	
	a Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumber-nya dari Daerah Provinsi Lain	7 Kab/Kota (Kuansing, Inhu, Inhil, Siak, Kampar, Rohul, Meranti)	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.800 Ekor 58 Klp 7 Kab/Kot 100 ekor/klp	APBD Ayam : 5.800 Ekor (100 ekor/Kelp)
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	16 Persen	
1	Penataan Prasarana Pertanian		Pesentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	20 Persen	
	a Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Inhu, Rohul	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	180 Ha	Alokasi : 2 Kelp Bantuan Ternak Sapi : 20 Ekor
	b Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kuansing, Inhu, Pelalawan	Jumlah prasarana pascapanen Peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Dokumen	Sertifikasi Pengolahan Pupuk : 3 Unit
	c Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rohil	Jumlah pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	Pembangunan Pos Check Point

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1. Persentase Angka Kematian Ternak	2.10 Persen	
			2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk	10 Persen	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS	10 Persen	
	a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	APBD Vaksin : Rabies : 25.000 dosis Jembrana : 12.000 dosis PMK : 4.122 dosis SE : 10.000 dosis Jasa Pelayanan Keswan : 36.275 ekor APBN* Jembrana : 28.500 dosis PMK : 8.560 dosis LSD : 400 dosis * belum disetujui

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
1	2	3	4	5	6
	b Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	<i>Jasa Surveilans : 2.000 Ekor Prioritas pada surveilans post vaksinasi Kemungkinan untuk surveilans: Rabies: BVet Bukittinggi AI: UPT LVKH</i>
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	
	a Pengawasan Peredaran Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	
	b Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Kuansing, Inhil, Kampar, Rohil & Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	<i>(Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi)</i>
3	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	14 Wilayah	
	a Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	44 Laporan	<i>(Jumlah Unit Usaha akan disertifikasi dan di surveillance)</i>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
1	2	3	4	5	6
	b Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	70 Orang	(Sosialisasi Kader Siaga Rabies (Kasira))
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok yang membentuk korporasi	15 Persen	
1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	50 Kelompok	
	a Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	(Jumlah Klp yang Dibina oleh Pentugas Pendamping) Pendamping : 59 Orang Klp yang Dibina : 661 Klp Jumlah Klp yang Naik Kelas : 50 Klp
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	
	a Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pelalawan, Dumai	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	Jumlah Korporasi Dibentuk : 2 Unit Kelompok yang Menerapkan Sistem Agribisnis : 60 Kelp

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2024–2029, kebijakan subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan peternak, serta keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menetapkan empat arah kebijakan utama, yaitu :

1. Pengolahan dan pemasaran produk peternakan bernilai tambah dan berdaya saing;
2. Produksi ternak produktif berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional;
3. Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional; dan
4. Penyelenggaraan birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang berfokus pada :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian; serta
3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima.

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat keselarasan antara Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024–2029 dengan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026. Keselarasan tersebut tampak pada kesamaan arah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran nasional subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat diintegrasikan atau dilakukan sharing kegiatan antara pusat dan daerah karena keterbatasan anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam menetapkan tujuan pembangunan subsektor peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya tujuan kedua, yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan strategis, yaitu **“Terwujudnya peningkatan ketersediaan produk komoditas peternakan dan kesejahteraan petani.”**

Indikator pencapaian tujuan tersebut meliputi:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan daging, dan
2. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT).

Indikator pemenuhan kebutuhan daging digunakan untuk mengukur sejauh mana produksi daging ruminansia lokal mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Provinsi Riau. Diharapkan ke depan, kontribusi ternak lokal terhadap pemenuhan kebutuhan daging ruminansia semakin meningkat, mengingat saat ini sebagian besar pasokan masih berasal dari luar provinsi.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemampuan daya beli peternak di wilayah pedesaan. NTPT menggambarkan rasio antara Indeks Harga yang Diterima Peternak (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Peternak (Ib), yang kemudian dikalikan dengan angka 100.

Nilai ini menunjukkan daya tukar antara produk peternakan yang dihasilkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi, termasuk biaya produksi. Semakin tinggi NTPT, semakin besar kemampuan peternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti tingkat kesejahteraannya juga meningkat.

Dengan kata lain, peternak berada dalam kondisi “surplus”, karena nilai jual hasil produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga dan biaya usahanya.

Selanjutnya, sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran memiliki karakteristik spesifik, terukur, dan realistis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga kemajuannya dapat diukur secara nyata selama periode perencanaan.

Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal, dengan indikator :
Persentase peningkatan produksi daging ruminansia lokal;
2. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia, dengan indikator :
 - a. Persentase penurunan kasus penyakit hewan; dan
 - b. Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Rumusan lengkap mengenai tujuan, sasaran, serta target tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Daging (%)	66	68	70	72	74
		Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) (Nilai)	98	100	101	102	102,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Lokal (%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia	Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%)	10	10	10	10	10
		Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	75,85	76,5	77	78	79

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses perencanaannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merumuskan secara rinci sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran, dan dituangkan secara terstruktur dalam dokumen Rencana Kerja.

Dokumen Renja memuat uraian mengenai target kinerja tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Target tersebut berfungsi sebagai komitmen kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk dicapai dalam periode satu tahun, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan demikian, Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tidak hanya menjadi instrumen perencanaan tahunan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kebijakan dan arah pembangunan melalui lima (5) program utama. Program-program tersebut disusun sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keamanan pangan asal ternak, serta memperkuat kesejahteraan peternak di daerah.

Setiap program mencakup rangkaian kegiatan yang tidak hanya mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, tetapi juga menjadi program prioritas yang berorientasi langsung pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing komoditas peternakan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, arah pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini berfokus pada penyediaan dan peningkatan sarana produksi peternakan, seperti bibit ternak unggul, pakan, obat hewan, dan peralatan budidaya. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha peternakan rakyat serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan komoditas asal ternak.

2. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia peternakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada peternak. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan peternak dapat mengelola usaha ternaknya secara lebih efisien, berorientasi pasar, serta berdaya saing tinggi.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung peternakan seperti kandang komunal, rumah potong hewan (RPH), instalasi pengolahan limbah, serta sarana transportasi dan penyimpanan produk hewan. Keberadaan prasarana yang memadai diharapkan mampu mendukung kelancaran rantai produksi dan distribusi produk peternakan.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk melindungi populasi ternak dan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular serta menjamin keamanan produk hewan yang dikonsumsi masyarakat. Kegiatannya meliputi pengawasan lalu lintas hewan, vaksinasi, surveilans penyakit, pengendalian zoonosis, serta penerapan prinsip produk Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini mencakup kegiatan administratif, perencanaan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur. Tujuannya adalah memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program teknis peternakan serta kesehatan hewan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dari kelima program tersebut, terdapat dua (2) program yang ditetapkan sebagai Program Prioritas Kepala Daerah, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Kedua program ini dianggap strategis karena berperan langsung dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, memperkuat daya saing subsektor peternakan, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang pertanian dan peternakan.

Penjabaran lebih rinci mengenai rencana kegiatan dan subkegiatan dari masing-masing program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 yang memuat uraian program, indikator kinerja, target, dan alokasi sumber daya disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 (**Tabel. T-C.33**)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				41.439.844.951,00			53.432.127.728,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				41.439.844.951,00			53.432.127.728,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				41.439.844.951,00			53.432.127.728,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.665.815.069,00			33.462.200.228,00
	<i>Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	32.665.815.069,00			33.462.200.228,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		5 Laporan	27.952.743.474,00			28.452.743.474,00
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	2784 Orang/Bulan	27.952.743.474,00			28.452.743.474,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi		6 Jenis	805.941.814,00			1.429.456.754,00
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab	1 Paket	29.999.222,00			100.000.000,00
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab	1 Paket	288.596.341,00			329.456.754,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	1 Paket	60.982.020,00			200.000.000,00
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	1 Paket	47.306.231,00			150.000.000,00
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	379.058.000,00			650.000.000,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		4 Jenis	3.250.984.781,00			2.705.000.000,00
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Semua Kota/Kab	1 Laporan	748.000,00			5.000.000,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	1.099.999.048,00			1.100.000.000,00
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	1 Laporan	67.100.000,00			100.000.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	2.083.137.733,00			1.500.000.000,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		6 Jenis	656.145.000,00			875.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Semua Kota/Kab	1 Unit	44.030.000,00			50.000.000,00
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Semua Kota/Kab	14 Unit	582.115.000,00			750.000.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Semua Kota/Kab	18 Unit	30.000.000,00			75.000.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.823.856.000,00			12.097.427.500,00
	<i>Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak</i>	<i>Jumlah Populasi Sapi</i>		203250 Ekor	6.823.856.000,00			12.097.427.500,00
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah produksi pakan unggul (Ton)</i>		3150 Ton	-			-
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab	1 laporan	-			-
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Angka kelahiran (Persen)</i>		13.40 Persen	1.325.176.000,00			4.437.427.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	<i>Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat</i>	Semua Kota/Kab	3 Laporan	-			-
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	Semua Kota/Kab	1 laporan	1.325.176.000,00			4.437.427.500,00
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>		311 ST	5.498.680.000,00			7.660.000.000,00
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>	Semua Kota/Kab	25160 Ekor	5.498.680.000,00			7.660.000.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				160.852.000,00			1.000.000.000,00
	Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	<i>Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi</i>		0,78	160.852.000,00			1.000.000.000,00
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana</i>		22 Persen	160.852.000,00			1.000.000.000,00
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	<i>Luas kawasan pertanian yang termfaatkan</i>	Kab. Kuantan Singingi	300 Ha	-			-
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>	Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu	3 Unit	160.852.000,00			1.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.750.271.882,00			6.472.500.000,00
	Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	<i>Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</i>		85 Persen	1.750.271.882,00			6.472.500.000,00
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%)</i>		10 Persen	875.456.250,00			4.418.000.000,00
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	<i>Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan</i>	Semua Kota/Kab	12 Wilayah	113.475.000,00			268.000.000,00
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab	36 Laporan	761.981.250,00			4.150.000.000,00
	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	<i>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</i>		10	5.236.995.302,00			6.472.500.000,00
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	<i>Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point</i>		90 Persen	776.655.632,00			1.314.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>	Semua Kota/Kab	1 Laporan	101.655.632,00			214.500.000,00
	Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	<i>Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis</i>		85 Persen	5.236.995.302,00			6.472.500.000,00
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>	Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hilir	60 Laporan	675.000.000,00			1.100.000.000,00
	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	<i>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</i>		10	5.236.995.302,00			6.472.500.000,00
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar</i>		15 Wilayah	98.160.000,00			740.000.000,00
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner</i>	Semua Kota/Kab	39 Laporan	95.910.000,00			420.000.000,00
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan</i>	Semua Kota/Kab	24 Orang	2.250.000,00			320.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				39.050.000,00			400.000.000,00
	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	<i>Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi</i>		0,94 Persen	39.050.000,00			400.000.000,00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	<i>Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis</i>		60 Kelompok	39.050.000,00			400.000.000,00
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu	1 Unit	39.050.000,00			400.000.000,00
	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK				1.745.811.400,00			2.740.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.745.811.400,00			2.740.000.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.745.811.400,00			2.740.000.000,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	895.811.400,00			500.000.000,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		6 Jenis Layanan	-			-
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru	1 Paket	-			-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>		1 Jenis Barang	-			-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Pekanbaru	2 Unit	-			-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		1 Jenis	895.811.400,00			500.000.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	895.811.400,00			500.000.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>		3 Persen	850.000.000,00			2.240.000.000,00
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)</i>		15.000 Dosis	850.000.000,00			2.240.000.000,00
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	Semua Kota/Kab	12 laporan	850.000.000,00			2.240.000.000,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		16 Persen	-			-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT</i>		78 Persen	-			-
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan</i>	Semua Kota/Kab	2 Unit	-			-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Direhabilitasi</i>						
	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN				1.882.591.600,00			5.710.391.849,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.882.591.600,00			5.710.391.849,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.882.591.600,00			5.710.391.849,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	1.482.592.000,00			1.960.391.849,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		1 Jenis	482.592.000,00			760.391.849,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	482.592.000,00			760.391.849,00
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase Layanan BLUD sesuai Standar</i>		100 Persen	1.000.000.000,00			1.200.000.000,00
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	Kota Pekanbaru	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00			1.200.000.000,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				399.999.600,00			3.750.000.000,00
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase penurunan kasus PHMS (%)</i>		10 Persen	200.000.000,00			2.000.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan</i>	Semua Kota/Kab	12 Laporan	200.000.000,00			2.000.000.000,00
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet</i>		30 Unit	199.999.600,00			1.750.000.000,00
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Semua Kota/Kab	300 Dokumen	199.999.600,00			1.750.000.000,00
	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				1.752.176.000,00			5.021.178.340,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.752.176.000,00			5.021.178.340,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.752.176.000,00			5.021.178.340,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>		100 Persen	1.390.877.320,00			1.030.000.000,00
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</i>		1 Jenis Layanan	96.980.000,00			50.000.000,00
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	Kab. Kampar	1 Paket	96.980.000,00			50.000.000,00
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>		1 Jenis	20.000.000,00			100.000.000,00
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Kampar	4 Unit	20.000.000,00			100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>		3 Jenis	1.264.897.320,00			830.000.000,00
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Kampar	12 Laporan	48.000.000,00			50.000.000,00
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar	1 Laporan	14.640.000,00			30.000.000,00
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Kampar	12 Laporan	1.202.257.320,00			750.000.000,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>		1 Jenis	9.000.000,00			50.000.000,00
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Kampar	3 Unit	9.000.000,00			50.000.000,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi</i>		3 Persen	361.298.680,00			3.991.178.340,00
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT</i>		3 Ekor	361.298.680,00			3.991.178.340,00
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>	Kab. Kampar	12 laporan	361.298.680,00			3.991.178.340,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)</i>		50 ST	-			-
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain</i>		50 Ekor	-			-
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan</i>		16 Persen	-			-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana	<i>Persentase pemenuhan</i>		65 Persen	-			-
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>	Kab. Kampar	2 Unit	-			-
J U M L A H					46.820.423.951,00			66.903.697.917,00

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 46.820.423.951,- dan perkiraan maju rencana tahun 2027 sebesar Rp. 66.903.697.917,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Pada Renja Tahun 2026, Program Kegiatan Dinas dan UPT lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau anggarannya terpisah. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di Dinas, anggaran sebesar Rp 6.823.856.000,- pada tahun 2026 dan untuk tahun 2027 sebesar Rp 12.097.427.500,-. Sedangkan di UPT Inseminasi Buatan Ternak, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2026 sebesar Rp 850.000.000,- dan tahun 2027 sebesar Rp 2.240.000.000,-. Pada UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2026 sebesar Rp 361.298.680,- dan tahun 2027 sebesar Rp 3.991.178.340,-
2. Pagu anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian tahun 2026 sebesar Rp 160.852.000,- dan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,-.
3. Program Penyuluhan Pertanian direncanakan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 39.050.000,- dan tahun 2027 sebesar Rp 400.000.000,-.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2026 sebesar Rp 1.750.271.882,- dan tahun 2027 sebesar Rp 6.472.500.000,-. Sedangkan di UPT. Laboratorium Veteriner dan klinik Hewan anggaran untuk program ini tahun 2026 sebesar Rp 399.999.600,- dan tahun 2027 sebesar 3.750.000.000,-.
5. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2026 sebesar Rp 32.665.815.069,- dan tahun 2027 juga sebesar Rp 33.462.200.228,-. Pada UPT Inseminasi Buatan Ternak pada program yang sama untuk tahun 2026 anggarannya sebesar 895.811.400,- dan tahun 2027 juga sebesar Rp. 500.000.000,-. Pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tahun 2026 sebesar Rp 1.482.592.000,- dan

tahun 2027 sebesar Rp 1.960.391.849,- sedangkan di UPT Pengembangan Ternak dan Pakan anggaran pada program ini tahun 2026 sebesar Rp 1.390.877.320,- dan tahun 2027 direncanakan sebesar Rp 1.030.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 terdapat 5 (lima) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			41.439.844.951,00							53.432.127.728,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			41.439.844.951,00							53.432.127.728,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			41.439.844.951,00							53.432.127.728,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			32.665.815.069,00							33.462.200.228,00	
	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen	32.665.815.069,00						-	33.462.200.228,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan	27.952.743.474,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-	-	28.452.743.474,00	DPKH
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2784 Orang/ Bulan	27.952.743.474,00	Kota Pekanbaru	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		28.452.743.474,00	DPKH
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis	805.941.814,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-	-	1.429.456.754,00	DPKH
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.222,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		100.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	288.596.341,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		329.456.754,00	DPKH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.982.020,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		200.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.306.231,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		150.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	379.058.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		650.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	3.250.984.781,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-	-	2.705.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	748.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		5.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.099.999.048,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		1.100.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	67.100.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		100.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.083.137.733,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		1.500.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis	656.145.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-	-	875.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	44.030.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		50.000.000,00	DPKH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	582.115.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		750.000.000,00	DPKH
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	-		75.000.000,00	DPKH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			6.823.856.000,00							12.097.427.500,00	
	Meningkatnya Populasi Komoditas Ternak	Jumlah Populasi Sapi	203250 Ekor	6.823.856.000,00						-	12.097.427.500,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3150 Ton	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Bank Pakan / Produksi Pakan / Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba	-	-	DPKH
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	-	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Bank Pakan / Produksi Pakan / Budidaya Sapi Potong, Kambing, Domba		-	DPKH
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.40 Persen	1.325.176.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak	-	4.437.427.500,00	DPKH
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	-	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		-	DPKH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1.325.176.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		4.437.427.500,00	DPKH
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	311 ST	5.498.680.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak	-	7.660.000.000,00	DPKH
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	25160 Ekor	5.498.680.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		7.660.000.000,00	DPKH
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			160.852.000,00							1.000.000.000,00	
	Meningkatnya Kawasan Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	0,78	160.852.000,00						-	1.000.000.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	22 Persen	160.852.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak	-	1.000.000.000,00	DPKH
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	300 Ha	-	Kab. Kuantan Singingi	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		-	DPKH
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikelola dan dimanfaatkan	3 Unit	160.852.000,00	Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		1.000.000.000,00	DPKH
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.750.271.882,00							6.472.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85 Persen	1.750.271.882,00						-	6.472.500.000,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	875.456.250,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak	-	4.418.000.000,00	DPKH
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	113.475.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		268.000.000,00	DPKH
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	761.981.250,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak		4.150.000.000,00	DPKH
	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10	1.750.271.882,00							6.472.500.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	776.655.632,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha / Check Point	-	1.314.500.000,00	DPKH
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	101.655.632,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha / Check Point		214.500.000,00	DPKH
	Meningkatnya Luas Wilayah yang terkendali dari penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	85 Persen	1.750.271.882,00							6.472.500.000,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	675.000.000,00	Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hilir	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha / Check Point		1.100.000.000,00	DPKH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	10	1.750.271.882,00							6.472.500.000,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	15 Wilayah	98.160.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha	-	740.000.000,00	DPKH
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	39 Laporan	95.910.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha		420.000.000,00	DPKH
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	24 Orang	2.250.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / Unit Usaha		320.000.000,00	DPKH
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi	0,94 Persen	39.050.000,00						-	400.000.000,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	39.050.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / GAPOKTAN (Korporasi Peternakan)	-	400.000.000,00	DPKH
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	39.050.000,00	Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	Kelompok Ternak / GAPOKTAN (Korporasi Peternakan)		400.000.000,00	DPKH
	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK			1.745.811.400,00							2.740.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.745.811.400,00							2.740.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.745.811.400,00							2.740.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen	895.811.400,00						-	500.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis Layanan	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT	-	-	UPT IBT
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Kota Pekanbaru	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		-	UPT IBT
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis Barang	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		-	UPT IBT
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Kota Pekanbaru	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		-	UPT IBT
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	895.811.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT	-	500.000.000,00	UPT IBT
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	895.811.400,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		500.000.000,00	UPT IBT
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen	850.000.000,00						-	2.240.000.000,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	15.000 Dosis	850.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT	-	2.240.000.000,00	UPT IBT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		2.240.000.000,00	UPT IBT
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	16 Persen	-						-	-	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	78 Persen	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT	-	-	UPT IBT
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	-	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT IBT		-	UPT IBT
	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN			1.882.591.600,00							5.710.391.849,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.882.591.600,00							5.710.391.849,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.882.591.600,00							5.710.391.849,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen	1.482.592.000,00						-	1.960.391.849,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	482.592.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH	-	760.391.849,00	UPT LVKH
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	482.592.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH		760.391.849,00	UPT LVKH
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	100 Persen	1.000.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH	-	1.200.000.000,00	UPT LVKH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	Kota Pekanbaru	Pendapatan dari BLUD	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH		1.200.000.000,00	UPT LVKH
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			399.999.600,00						-	3.750.000.000,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	200.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH	-	2.000.000.000,00	UPT LVKH
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH		2.000.000.000,00	UPT LVKH
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	30 Unit	199.999.600,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH	-	1.750.000.000,00	UPT LVKH
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300 Dokumen	199.999.600,00	Semua Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT LVKH		1.750.000.000,00	UPT LVKH
	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN			1.752.176.000,00							5.021.178.340,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.752.176.000,00							5.021.178.340,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.752.176.000,00							5.021.178.340,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen	1.390.877.320,00						-	1.030.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan	96.980.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi			50.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	96.980.000,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		50.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis	20.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP	-	100.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		100.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis	1.264.897.320,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP	-	830.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		50.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.640.000,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		30.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.202.257.320,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		750.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis	9.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP	-	50.000.000,00	UPT PTP
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9.000.000,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		50.000.000,00	UPT PTP
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen	361.298.680,00						-	3.991.178.340,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	3 Ekor	361.298.680,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP	-	3.991.178.340,00	UPT PTP
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan	361.298.680,00	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		3.991.178.340,00	UPT PTP
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	50 ST	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		-	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	50 Ekor	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		-	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	16 Persen	-						-	-	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana	Persentase pemenuhan	65 Persen	-			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP	-	-	UPT PTP
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit	-	Kab. Kampar	Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi	UPT PTP		-	UPT PTP
J U M L A H				46.820.423.951,00							66.903.697.917,00	

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 disusun berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta pagu indikatif perangkat daerah sesuai Renstra 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan selama satu tahun, sekaligus menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 sangat dipengaruhi kecukupan anggaran dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Jika terjadi penyesuaian pagu anggaran, fokus tetap diarahkan pada kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan penyakit hewan prioritas dan zoonosis, peningkatan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan peternak, penguatan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet). Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kelompok peternak, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keselarasan program dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Renja Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, berbasis data dan analisis teknis, partisipatif dan kolaboratif, transparan dan akuntabel, patuh pada peraturan perundang-undangan terkait SPM, kesehatan hewan, Kesmavet, kesejahteraan hewan, perizinan, serta mutu dan keamanan pangan asal hewan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan menjaga pelaksanaan Renja tetap terarah, terukur, dan konsisten dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Untuk menjamin implementasi Renja Tahun 2026 berjalan optimal, ditetapkan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. menyesuaikan RKA sesuai pagu indikatif dan hasil pembahasan TAPD tanpa mengurangi prioritas pelayanan dasar;
2. menyusun *action plan* per bidang dengan target triwulan, indikator *output*, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme koordinasi;

3. memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis data serta pelaporan berkala;
4. mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti APBN;
5. melaksanakan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kabupaten/kota, kelompok peternak, dan pelaku usaha.

Dengan demikian, Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang aspiratif, implementatif, adaptif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan sektor peternakan yang sehat, berdaya saing dan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, November 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU


Dra. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 500.7.1/Kpts/DPKH-SEKR/138

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pasal 125 sampai dengan pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 31 Desember 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1457/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

14. Surat Perintah Tugas Gubernur Riau Nomor : 800.1.11.1/BKD/20593 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor : 500.7.1/Kpts/DPKH-SEKR/111 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi & Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan dokumen kebijakan lainnya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025;
 - e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - f. Perumusan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI RIAU



Drs. HERI AFRIZON, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700709 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
 Nomor : 500.7.1/Kpts/DPKH-SEKR/ 138
 Tanggal : 13 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN
 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. Heri Afrizon, M.Si	Plt. Kepala Dinas
2	Sekretaris	Ayu Susanti, SE	Sekretaris Dinas
3	Sekretariat		
	- Koordinator	Dedy Irawan, SP	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program
	a. Anggota 1	Hamam ismail, S.Sos, M.Si	Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
	b. Anggota 2	Syed M. Syukri, S.IP	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	c. Anggota 3	Laila Diana, SP, MM	Fungsional Perencana Ahli Muda
	d. Anggota 4	Yuhendra, S.Pt, M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda
	e. Anggota 5	Nurkhadijah, S.Pt	Fungsional Ahli Pertama
	f. Anggota 6	Novriati Teza, S.Pt, M.MA	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Kelompok Kerja Bidang Produksi Peternakan		
	- Koordinator	Dedy Irawan, SP	Plt. Kepala Bidang Produksi Peternakan
	a. Anggota 1	H. Elyan Burza, SP, M.Si	Ketua Tim Kerja Pakan Ternak & Pengembangan Kawasan Peternakan dan Integrasi Ternak
	b. Anggota 2	Ummi Qoriah, S.Pt	Ketua Tim Kerja Budidaya Ternak
	c. Anggota 3	Donny Aprizal, S.Pt	Ketua Tim Kerja Perbibitan Ternak
5	Kelompok Kerja Bidang Agribisnis Peternakan		
	- Koordinator	Drs. Heri Afrizon, M.Si	Kepala Bidang Agribisnis Peternakan
	a. Anggota 1	Elfita Sari Nur, S.Pt	Ketua Tim Kerja Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan
	b. Anggota 2	Eldja Aulia Riza, S.Pi	Ketua Tim Kerja Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan
	c. Anggota 3	Oryza Febrina, S.Pt, M.IP	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan Peternakan
6	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Hewan		
	- Koordinator	drh. Faralinda Sari	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
	a. Anggota 1	drh. Revalita Budhiani	Ketua Tim Kerja Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
	b. Anggota 2	drh. Adriyan Permana Putra	Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
	c. Anggota 3	Salita Syahrial, S.Pt	Ketua Tim Kerja Pengamatan Penyakit Hewan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
7	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	- Koordinator	Budhi Iskandar, SE, MBA	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
	a. Anggota 1	Pipi Desvita, S.Pi	Ketua Tim Kerja Higiene Sanitasi
	b. Anggota 2	drh. Ade Rukmantara	Ketua Tim Kerja Pengawasan Keamanan Produk Hewan
	c. Anggota 3	drh. Habibul Rizki Marros	Ketua Tim Kerja Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
8	Kelompok Kerja UPT. Inseminasi Buatan Ternak		
	- Koordinator	Mariato Syam, ST	Kepala UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	a. Anggota 1	Erwan Setiawan, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	b. Anggota 2	Mardianto, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Pembibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak
	c. Anggota 3		Plt. Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku
9	Kelompok Kerja UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan		
	- Koordinator	drh. Rahmat Setiyawan	Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	a. Anggota 1	Marveni Destiana, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	b. Anggota 2	drh. Dewi Anggreini, MM	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
	c. Anggota 3	drh. Amir Subagya	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Kelompok Kerja UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan		
	- Koordinator	Achmad Danafia, SP	Kepala UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	a. Anggota 1	Zulkarnain Hasan, S.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	b. Anggota 2	Ekal Hendrayani, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak
	c. Anggota 3	Wan Saiful Effendi, Ap, M.Si	Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak

Plt. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. HERI AFRIZON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700709 199101 1 001

Formulir E.29
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan RenstraPerangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

Pekanbaru, November 2025

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



[Signature]
Drs. MIM MULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660727 199102 2 0014

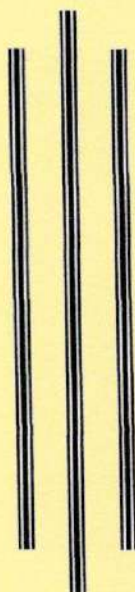


PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026



NOMOR : /LHR/INSP-RIAU/lr.IV/XII/2025
TANGGAL : DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	Marjunita, S.E
	Tanggal	25 November 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	25 November 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	25 November 2025

CATATAN HASIL REVIU	
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026	
Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 01
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 02
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 telah sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD	KKR 03
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III telah selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.	

D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :	
1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.a
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.	
2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026.	
3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.e

Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 belum diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026.	
6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR 04.f
Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani indikator target pada Renstra-PD.	
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	
SARAN	
Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 agar :	
1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026.	
2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau.	
3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.	
4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD.	

5. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD.

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU,


Dra. MIMI YULIANI N, Apt, MM
NIP. 19660717 199102 2 001

Pekanbaru, 25 November 2025
PENGENDALI MUTU,


Drs. ARMANSYAH
NIP. 19631231 198303 1 309

KERTAS KERJA REVIU (KKR) 01
PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		HARD COPY	SOFT COPY	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
1.	Rancangan akhir Renja-PD 2026		Ada		
2.	Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029		Ada		
3.	RKPD Tahun 2026	Ada	Ada	Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025.	
4.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya (Formulir E. 55)		Ada		
5.	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah (Formulir E. 29)				Untuk dilengkapi Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
6.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah (SKPD)		Ada		
7.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025				Untuk dilengkapi Berita Acara Musrenbang RKPD
8.	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD, dan Kebijakan Pemerintah Daerah.	Ada	Ada		
9.	Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah				Untuk dilengkapi
10.	Orientasi dan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.				Untuk dilengkapi Orientasi dan Agenda Kerja
11.	Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);		Ada		
12.	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026				Untuk dilengkapi Kertas Kerja dalam Penyusunan Renja-PD

[illegible]

			6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	Berikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
		2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	1. Sejahtera mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam pemusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
		2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	Berikan uraian mengenai:	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			1. Proses yang dilakukannya itu membandingkan antaranrancang awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
			4. Lampirkan table berikut, Tabel T-C.31:	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan

		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	Ada Ada Ada Ada Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
3	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.		
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.		
		3.3 Program dan Kegiatan	Berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dari kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengantasan komiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan

			2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut. Disediakan untuk BAB IV		
4	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan
5	V	PENUTUP	Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Keadah-keadah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemrintah daerah yang bersangkutan	Ada	Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan Penyajian sistematisa penulisan dokumen Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Ketentuan

KERTAS KERJA REVIU (KKR) 03
PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU DENGAN RANHIR RKPD

NO	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RENJA-PD	TUJUAN/SASARAN PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN PEREVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing	√		
1.	Sasaran : Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	√		
2.	sasaran : Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan kesejahteraan Petani	√		
3.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	√		

KERTAS KERJA REVIU (KKR) 04.a
PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

KODE	TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Produk Komoditas Peternakan dan Kesejahteraan Petani	1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah	√		Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan didasari dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
2.	1. Sasaran : Meningkatnya produksi daging ruminansia lokal 2. Sasaran : Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia 3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat 3. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat	√		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				

UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana				
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				

KERTAS KERJA REVU (KKR) 04.b
PENGUJIAN ATAS SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CATATAN HASIL REVU		
		RENSTRA	RENJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemertan dan Kesehatan Hewan					
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi		√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		√		Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selaras dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD

3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Rancangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznanya	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
1.77.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	Jumlah Populasi Gapi		✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memiliki SNI (Dosis)	Jumlah produksi pakan unggas (Ton)	Jumlah produksi pakan unggas (Ton)	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyebaran dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	Persentase Angka kelahiran (Persen)	Persentase Angka kelahiran (Persen)	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung
1.77.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi		✓	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Rerja PD dan Rancangan RerjaPD

3.27.03.1.01	Pondasi Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemantauan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.01.0019	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Limas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemenuhan dan Penyelenggaraan Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemenuhan dan/atau Penyelenggaraan Hewan, Produk Hewan dan/atau Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemenuhan dan/atau penyelenggaraan HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemenuhan dan/atau penyelenggaraan HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemenuhan dan/atau penyelenggaraan HPM	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelombagawan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelombagawan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						

3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Manusia	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Manusia			√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	Persentase Peningkatan Populasi			√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan			√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		√	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD

UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.19	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	Persentase Layanan BLUD sesuai Standar		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak			√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemukiman dan Pembukaan Daerah Wilayah Penyakit Hewan Menular Linfas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Person)	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Person)	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Person)		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikat Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Kawasan kesmavet	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Kawasan kesmavet	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Kawasan kesmavet		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis layanan Administrasi-trasi Umum yang di penuhi		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		√	Indikator Kegiatan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Rerja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RerjaPD

3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi	Persentase Peningkatan Populasi		√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.06	Pengendalian dan Pengawasan Pe-nyediaan dan Peralatan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.06.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produk Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Provinsi Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbahnya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbahnya dari daerah provinsi lain	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan		√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.61	Penataan Prasarana	Persentase pemenuhan	Persentase pemenuhan	Persentase pemenuhan	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD
3.27.03.1.61.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	√	Indikator Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD telah selesai dan mendukung Indikator Kinerja Program dalam Dokumen Renstra PD dan Rancangan RenjaPD

KERTAS KERJA REVIU (KKR) 04.c
PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR DALAM			CATATAN HASIL REVIU		
		RENSTRA	RKPD 2026	RANHIR RENJA 2026	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	√		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	√		
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	√		
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	√		
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	√		
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	√		
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√		
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	√		
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	√		
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	√		
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	√		
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	√		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Sapi	Jumlah Populasi Sapi	Jumlah Populasi Sapi	√		

3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	√		
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	√		
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1. Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan) 2. Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	Persentase Angka kelahiran (Persen)	Persentase Angka kelahiran (Persen)	√		
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	√		
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	√		
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	√		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	√		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit) 2. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit) 3. Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit) 4. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Unit) 5. Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) 6. Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	√		
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan		Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan	√		
3.27.03.1.01.0019	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	√		

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	√		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) 2. Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan) 3. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	√		
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	√		
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	√		
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	√		
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	√		
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	√		
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1. Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan) 2. Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	√		
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	√		
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	√		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	√		
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	√		
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	√		

UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	√		
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	√		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi	Persentase Peningkatan Populasi	√		
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	√		
3.27.02.1.04.0004	Pengenbangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	√		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	√		Rumusan indikator Program, Kegiatandan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	√		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	√		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	√		

3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	√		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak	√		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	√		
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	√		
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	√		
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	√		
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan	√		
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	√		
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	√		
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	√		
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	√		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	√		
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	√		
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	√		
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	√		
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	√		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi	Persentase Peningkatan Populasi	√		
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Pe-nyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	√		
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	√		

3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)		√	Rumusan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain		√	Rumusan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan		√	Rumusan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana			Persentase pemenuhan		√	Rumusan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		√	Rumusan indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra PD dan RKPD

PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU
KERTAS KERJA REVIU (KKR) 04.d

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RUMUSAN PADA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PADA				CATATAN PEREVIU		
		RENSTRA	RKPD 2026	RANHIR RENJA 2025	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	✓			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓			
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓			
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓			
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	✓			
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓			
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓			
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	✓			
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓			
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	✓			
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓			
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓			
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓			
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓			
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓			

3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	✓	✓	
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	✓	✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.03.1.01.0018	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	✓	✓	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	✓	✓	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	✓	✓	
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	✓	✓	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	✓	✓	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	✓	✓	
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	✓	✓	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	✓	✓	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	✓	✓	
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	✓	✓	
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	✓	✓	

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	✓		
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	✓		
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	✓		
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	✓		
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	✓		
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	✓		
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	✓		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD

3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			Penataan Prasarana Pertanian		√	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		√	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√		
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			Peningkatan Pelayanan BLUD	√		
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	√		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	√		
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan			Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	√		
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	√		
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	√		

UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	✓	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	✓	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	✓	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Penilaian dan Peringkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peringkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peringkapan Kantor	✓	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	✓	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	✓	
3.27.02.1.06	Pengendalian dan Pengawasan Penyelesaian dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Penyelesaian dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Penyelesaian dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	✓	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyelesaian dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyelesaian dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyelesaian dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	✓	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Provinsi Lain	✓	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	√	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana			Penataan Prasarana	√	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	√	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum selaras dengan Renstra-PD dan RKPD

KERTAS KERJA REVU (KKR) 04.e
PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2026			CATATAN PEREVIU		
		RENSTRA	RKPD	RANHIR RENJA	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.488.366.173,00	32.665.815.069,00	32.462.784.173,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.452.743.474,00	27.952.743.474,00	32.462.784.173,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.452.743.474,00	27.952.743.474,00	28.452.743.474,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	898.309.651,00	805.941.814,00	734.857.651,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.997.079,00	29.999.222,00	52.997.079,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.596.341,00	288.596.341,00	228.596.341,00	✓		
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.900.000,00	60.982.020,00	26.900.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.306.231,00	47.306.231,00	47.306.231,00	✓		
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.058.000,00	379.058.000,00	379.058.000,00	✓		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.146.088.048,00	3.290.984.781,00	2.451.238.048,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.999.000,00	748.000,00	4.999.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.147.999.048,00	1.099.999.048,00	1.099.999.048,00	✓		
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.750.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00	✓		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.916.340.000,00	2.083.137.733,00	1.278.140.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	858.945.000,00	656.145.000,00	823.945.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.030.000,00	44.030.000,00	44.030.000,00	✓		
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.915.000,00	562.116.000,00	749.915.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	✓		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.600.000.000,00	6.823.856.000,00	3.501.966.900,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	225.563.000,00		225.563.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	225.563.000,00		225.563.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.787.050.000,00	1.325.176.000,00	2.256.654.900,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Temak	150.000.000,00		150.000.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	1.637.050.000,00	1.325.176.000,00	2.116.654.900,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.587.387.000,00	5.498.680.000,00	1.009.749.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.587.387.000,00	5.498.680.000,00	1.009.749.000,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.900.000.000,00	160.882.000,00	673.823.710,00		✓	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD

3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.900.000.000,00	160.852.000,00	673.823.710,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	800.000.000,00		373.824.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01.0019	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	300.000.000,00	160.852.000,00	299.999.710,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.285.094.176,00	1.750.271.882,00	5.236.995.302,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.347.210.000,00	675.456.250,00	4.310.049.940,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	150.000.000,00	113.475.000,00	149.999.940,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.058.050.000,00	761.981.250,00	4.160.050.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	736.460.000,00	776.655.632,00	736.455.186,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan		101.655.632,00	97.295.316,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	639.160.000,00	675.000.000,00	639.159.870,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		98.160.000,00	190.490.176,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan		95.910.000,00	125.471.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan		2.250.000,00	65.019.176,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	65.579.980,00	39.050.000,00	65.579.980,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	65.579.980,00	39.050.000,00	65.579.980,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	65.579.980,00	39.050.000,00	65.579.980,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		895.811.400,00	532.480.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor			15.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			72.280.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.280.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		895.811.400,00	445.200.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		895.811.400,00	445.200.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		850.000.000,00	1.244.329.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD

3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	850.000.000,00	1.244.329.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	850.000.000,00	1.244.329.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1.606.539.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		1.606.539.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		1.006.539.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.482.592.000,00	1.417.200.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.592.000,00	417.200.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.592.000,00	417.200.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	√	
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	√	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	399.999.600,00	1.150.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	500.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	200.000.000,00	500.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	199.999.600,00	650.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	199.999.600,00	650.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.390.877.320,00	1.075.902.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.980.000,00	148.452.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	96.980.000,00	148.452.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	60.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	60.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.897.320,00	632.450.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	√	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.640.000,00	9.650.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.257.320,00	774.800.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000,00	35.000.000,00	√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD

3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.000.000,00	35.000.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		361.298.680,00	3.244.255.150,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		361.298.680,00	2.136.215.150,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		361.298.680,00	2.136.215.150,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			1.108.040.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			1.108.040.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			300.000.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana			300.000.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			300.000.000,00		√	Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja PD belum diselaraskan dengan RKPD

KERTAS KERJA REVIU (KKR) 04.1
PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBTANSI ANTAR BAB PADA RANHIR RENJA-DPKH PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA		RANHIR RENJA		CATATAN HASIL REVIU		
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen	✓		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	2.784	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	5 Laporan		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.784	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2784 Orang/Bulan	✓		
3.27.01.1.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis	✓		
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	✓		
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	✓		
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	✓		
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	✓		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	✓		
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	✓		
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1	Jumlah Kendaraan	1 Unit	✓		
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	✓		
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Sapi	203.250	Jumlah Populasi Sapi	203250 Ekor	✓		
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	1	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3150 Ton		✓	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD

3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	√		
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1. Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan) 2. Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	3	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13,40 Persen	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	3 Laporan	√		
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	√		
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	160 ST	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	2.000	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	2000 Ekor	√		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	0,78	Persentase Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang dimanfaatkan untuk sistem integrasi	0,78	√		
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Kewan dan Kermavet (Unit) 2. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktek Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Kewan (Unit) 3. Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit) 4. Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Unit) 5. Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Unit) 6. Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	4	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	22 Persen	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	300	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	300 Ha	√		
3.27.03.1.01.0019	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Unit)	3	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	3 Unit	√		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	86 Persen	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) 2. Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan) 3. Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	3	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12 Wilayah	√		
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36 Laporan	√		
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	Persentase Pemonuan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	90 Persen	√		Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD

3.27.04.1.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemakaian dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0,94	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 Laporan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1. Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi (Kasi Nomor Kontrol Veteriner (Laporan) 2. Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	36	Jumlah Wilayah yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan Segar	15 Wilayah	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	38 Laporan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	60	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	54 Orang	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi		Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi	20 Pensi	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	60 Kelompok	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	2 Unit	√	
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Kebijakan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Pensi	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis Layanan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 Jenis Barang	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Persentase Peningkatan Populasi	3 Pensi	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SN (Dosis)	62.000 Dosis	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produk Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12 Laporan	√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	16 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT	78 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	1 Jenis		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			Persentase Layanan BLUD sesuai Standar	100 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak			√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)	10 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Kawasan kesmavet	30 Unit		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300 Dokumen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	100 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1 Jenis Layanan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Jenis		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	3 Jenis		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD

3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	1 Jenis		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Persentase Peningkatan Populasi	3 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	3 Ekor		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hewan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST)	50 ST		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	50 Ekor		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan	16 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana			Persentase pemenuhan	65 Persen		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit		√	Indikator Target Sub Kegiatan pada dokumen Rancangan Renja-PD belum selaras dengan Renstra-PD

TABEL VERIFIKASI RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	BAB I	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	√		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	√		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	√		
2.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30	✓ ✓		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31	✓ ✓		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	✓ ✓ ✓		
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓		
	3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan			

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		4. Sajikan Tabel T-C.33	✓		
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	✓		
5	BAB V	PENUTUP Berikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.	✓ ✓ ✓ ✓		
6	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 2. Formulir E-29			Agar dilampirkan (di dokumen renja) Agar dilampirkan(di dokumen renja)

Pekanbaru, November 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
Bappeda Provinsi Riau

1. NAMA : **ABDUL MADIAN**
NIP. : 197505162002121006

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sekretaris

1. NAMA : **AYU SUSANTI, SE**
NIP. : 196804271998032001

Verifikator
PERENCANA AHLI MUDA

1. NAMA : **RIZKY RACHMAWATI**
NIP. : 198003312009032002

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

2. NAMA : **HENNY DASRIYANTI**
NIP. : 198204242011022001

KETUA TIM PERENCANAAN

2. NAMA : **YUHENDRA, S.Pt.M. Si**
NIP. : 197507162005011006